

**TESIS**  
**KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN**  
**DI KABUPATEN JENEPONTO**

*CONFLICT OF INTEREST BETWEEN THE REGENT AND DEPUTY REGENT IN  
THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT  
IN JENEPONTO REGENCY*



Disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister  
pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

**OLEH:**  
**ANDI MUHAMMAD WAHYU ARFANSYAH BEBASA**  
**P4300216005**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2018**



TESIS

KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN  
DI KABUPATEN JENEPONTO

Disusun dan diajukan oleh  
**ANDI MUHAMMAD WAHYU ARFANSYAH BEBASA**  
Nomor Pokok P4300216005

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal **10 Desember 2018**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat



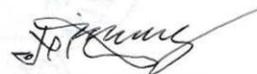
**Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si.**

Ketua

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,



**Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si.**



**Dr. Jayadi Nas., M.Si.**

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebasa

NIM : P4300216005

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "*Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto*" ini, adalah benar hasil karya ilmiah dan pemikiran saya sendiri. Bukan hasil karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ternyata tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 11 Januari 2019



Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebasa



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan Berkah dan limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Serta Salam dan Sholawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan Keluarganya beserta para Sahabat-Sahabatnya. Semoga keteladanan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan yang fana ini.

Tesis ini berjudul **“Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto”** Sebuah studi penelitian yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh derajat dan gelar magister pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini tidaklah mudah, maka tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan Tesis ini terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, serta kritikan yang bersifat membangun yang berguna untuk kesempurnaan Tesis ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses perkuliahan penulis di bangku kuliah hingga pada proses penulisan Tesis ini yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Namun, pada akhirnya semua dapat terlewati berkat ikhtisar dan kerja keras serta Do'a, dan tentunya dukungan dari berbagai pihak.



Lewat kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta penghormatan yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tuaku yang tercinta, Ayahanda Dr. A. Rahman Bebas, M.Si dan Ibunda Dra. Hj. Andi Fahisah Husain, M.Si yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, untaian do'a, serta pengorbanan yang penuh dengan ketulusan. Keselamatan di Dunia dan Akhirat untuk Ayah dan Ibu. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin. Serta, kedua Adikku Andi Muh. Fatwa A. Rahman Bebas dan Andi Annisa Arfanahyah Tenri Yustika Bebas yang selalu memberikan kebahagiaan, serta canda dan tawanya sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pendidikan Magister ini.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Armin Arsyad, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA selaku Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang terus memberikan saran, arahan, masukan serta dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Program Pascasarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.



6. Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si Selaku Penasehat I yang senantiasa memberikan saran, arahan, dan masukan serta motivasinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Jayadi Nas, S.Sos, M.Si Selaku Penasehat II yang senantiasa terus memberikan saran, arahan, masukan serta, motivasi dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Bapak Prof. Dr. H. Armin Arsyad, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si dan Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si Selaku Tim Penguji yang senantiasa memberikan arahan dan masukannya kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Seluruh dosen dan seluruh Staf Pegawai di Lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
10. Pemerintah Kabupaten Jeneponto terkhusus kepada Bupati Jeneponto Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si Karaeng Ninra', Wakil Bupati Jeneponto H. Mulyadi Mustamu, SH Karaeng Tinggi, Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto H. Muhammad Syarif, SH, MH Karaeng Patta, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jeneponto Farida, SP, M.Si, Kr. Bau, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jeneponto Drs. H. Muh. Jafar, M.Si, Kr. Siama', Kepala Dinas Kesbangpol Drs. H. Bossongang, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto Muhammad Idris, SP, M.Si, Kr. Jalling, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Turatea Dr.



Alimuddin, SH, MH, Camat Kelara' H. M. Nas Tangnga, Camat Batang Muh. Hatta, SH, Kr. Tinggi, Sekcam Batang Agus Mulia, S.STP, M.Si, Sekcam Binamu Syamsul Bahri, Saiful Mustamu, S.Sos selaku Raja Bangkala' (Karaeng Bangkala'), Dr. Adi Suryadi, M.Si selaku Pengamat Politik, terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan atas bantuan dan kerjasamanya selama masa penelitian berlangsung hingga penulis menyelesaikan Tesis ini.

11. Muhammad Idris, SP, M.Si Kr. Jalling dan Firman Sukung, SH, MH Kr. Ojeng terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas bantuan dan kerjasamanya selama masa penelitian berlangsung hingga penulis menyelesaikan Tesis ini.
12. Kr. Beta, Kr. Kulle, dan Kr. Sitaba terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas bantuan dan kerjasamanya selama masa penelitian berlangsung hingga penulis menyelesaikan Tesis ini.
13. Para Koordinator dan Tim Pemenangan SIAP-BISA (Iksan Iskandar – Mulyadi Mustamu), Tokoh Masyarakat, dan seluruh masyarakat Kabupaten Jeneponto terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan atas bantuan dan kerjasamanya selama masa penelitian berlangsung hingga penulis menyelesaikan Tesis ini.
14. Kakek dan Nenek kami, H. Bebasa Karaeng Lalo' dan Hj. Karejai Karaeng Sangka' serta Drs. H. Andi Husain Abdullah Petta Rani dan Hj. Andi Nihaya Husain Petta



Nisang terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis haturkan atas do'a dan dukungannya kepada penulis.

15. Paman dan Tante kami, Dra. Hj. Norma Bebasa Karaeng Cawang, Hj. Rosnia Bebasa Karaeng Ngai, Ir. H. Muhlis Bebasa Karaeng Turu', Maksud Bebasa, SH Karaeng Rapi', serta Dr. Ir. H. Andi Ahmad Husain, M.Si, dr. H. Andi Arief Husain, Sp.B, Dra. Andi Khadijah Husain, Hj. Andi Mudafir Husain, SE, Andi Wahidah Husain, Dra. Andi Nurhayati Husain, M.SI, Andi Darmawati Husain, SP, Dr. Andi Najib Husain, S.Sos, M.Si terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis haturkan atas do'a dan dukungannya kepada penulis.
16. Dian Merdekawaty, SH Terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a, dukungan, saran, dan motivasinya kepada penulis.
17. Irma Dwiyani Iksan (putri bapak Bupati Jeneponto Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si) terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis haturkan atas bantuan dan kerjasamanya.
18. Efendi Al-Qadri Mulyadi (putra bapak Wakil Bupati Jeneponto H. Mulyadi Mustamu, SH) terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas bantuan dan kerjasamanya.
19. Saudara-Saudaraku dan kakak-kakakku **"PASCASARJANA ILMU POLITIK UNHAS 2016"**. Akmalto (Ricardo), Kanda Rival, Kak Awi, Wulan, Fatma, Nisa, Kak Ica, Umi, Kak Fikar, Bang Paul, Bang James,



Bang Frans, Kak Jaya, Kak Mahbub, Kak Irwan, Kak Ovel, Kak Iccang, Kak Arta, Kak Wijaya, Kak Awi, Kak Vira, Kak Arianti, Kak Mega, Kak Erna, Kak Anisar “*Aku mengenal dikau tak cukup lama, separuh usiaku, namun begitu banyak pelajaran yang aku terima.*”

20. Kanda Zarni Adia Purna, S.IP, M.Si, Dg. Mile, Pak Jaya, Kanda Rustan Anshar, Hizkiawan Palinggi, S. Hut, Wandu Harmawan, S.IP, Fiqril Haqqi, Faisal Fajrin, Muh. Yusuf, S.IP, M.Si, Yusriah Amaliah, S.IP, Darwan Saputra, Saifullah Masdar, Kanda Aya', Amar, Dani, Awal, Icca', Rafa, Ali Mattonrokang, Naira, Ambo' Tang, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas dukungan, bantuan, dan kerjasamanya.

21. Keluarga, rekan, sahabat, dan handai taulan, serta kepada seluruh pihak, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi penulis.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang tertuang dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya, dalam pengembangan khazanah Ilmu Politik. Semoga pengetahuan yang penulis peroleh selama ini dan apa yang tertuang dalam Tesis ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Makassar, Desember 2018



**Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebas**

## ABSTRAK

**ANDI MUHAMMAD WAHYU ARFANSYAH BEBASA.** *Konflik Kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintah di Kabupaten Jeneponto* (dibimbing oleh Muhammad dan Jayadi Nas).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis penyebab dan dampak terjadinya konflik kepentingan antara bupati dan wakil bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten dan relevan sesuai dengan topik penelitian, dan melalui kajian pustaka. Selanjutnya, data yang didapatkan dianalisis melalui tahapan-tahapan pereduksian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pembagian kewenangan berdasarkan kesepakatan bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perbedaan kepentingan, perebutan kekuasaan, adanya dorongan dari elit dan kelompok kepentingan agar Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berpisah. Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto juga berdampak pada Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tidak kompak, sesama aparatur sipil negara di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) tidak kompak, program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tidak berjalan dengan baik, konflik antara pendukung/simpatian SIAP (Bupati Jeneponto) dan BISA (Wakil Bupati Jeneponto).

Kata kunci: konflik, konflik kepentingan, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto



## ABSTRACT

**ANDI MUHAMMAD WAHYU ARFANSYAH BEBASA.** *Conflict of Interest Between The Regent and Deputy Regent in The Implementation of Government in Jeneponto Regency (Supervised by Muhammad and Jayadi Nas)*

This study aims to describe and analyze the causes and effects of conflicts of interest between the Regent and Deputy Regent in implementing governance in Jeneponto Regency.

This study used a qualitative method. Data were collected through observation, in-depth interviews with competent and relevant speakers in accordance with the research topic, and through literature. Furthermore, the data obtained were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that the conflict of interest that occurs between the Regent and Deputy Regent of Jeneponto in the implementation of government in Jeneponto Regency is caused by several things, among others, the distribution of authority based on collective agreements that contradicts legislation, differences in interests, power struggles, the encouragement of elites, and interest groups so that Regent and Deputy Regent of Jeneponto separate. As well as the conflict of interest that occurs between the Regent and Deputy Regent of Jeneponto has an impact on the Regent and Deputy Regent of Jeneponto are not compact, fellow State Civil Apparatus in some Regional Device Organizations (OPD) are not compact, the Jeneponto District Government programs do not go well, and conflicts between supporters/sympathizers of SIAP (Regent of Jeneponto) and BISA (Deputy Regent of Jeneponto) occur.

**Keywords :** Conflict, Conflict of Interest, Regent and Deputy Regent of Jeneponto



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Konflik .....	12
B. Teori Elit Politik .....	26
C. Teori Kelompok Kepentingan .....	32
D. Teori Kewenangan .....	35
E. Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	41
F. Penelitian Terdahulu .....	46
G. Kerangka Pikir .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	56
B. Tipe Dasar Penelitian .....	56
C. Teknik Pengumpulan data .....	59



D. Sumber Data .....	60
E. Analisis data .....	63
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Penelitian.....	65
B. Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto .....	68
C. Potensi Pengembangan Wilayah .....	74
D. Demografi .....	78
E. Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 dan Tahun 2018 .....	82
F. Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jeneponto beserta Daftar Partai Pengusung Tahun 2013 .....	84
G. Biografi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto periode 2013-2018 .....	85
H. Sejarah Kabupaten Jeneponto .....	87
I. Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jeneponto dari Masa ke Masa .....	92
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penyebab terjadinya konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto periode 2013-2018 .....	93
1. Pembagian kewenangan berdasarkan kesepakatan bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan .....	93
2. Perbedaan kepentingan .....	109
Perebutan Kekuasaan .....	117
Adanya dorongan dari Elit dan kelompok kepentingan agar Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Berpisah .....	123



B. Dampak konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto periode 2013-2018 .....	126
1. Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tidak kompak .....	126
2. Konflik Kepentingan Antar Aparatur Sipil Negara .....	134
3. Program-Program Pemerintah Daerah Tidak Berjalan Dengan baik .....	137
4. Konflik antara pendukung dan simpatisan SIAP (Bupati) dan BISA (Wakil Bupati) .....	155
C. Implikasi Teoritik .....	165
D. Implikasi Empirik .....	169
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>171</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu .....	47
Tabel 4.1.	Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto .....	66
Tabel 4.2.	Penjelasan Pokok-Pokok Visi Kabupaten Jeneponto 2014-2019 .....	70
Tabel 4.3.	Penjelasan Misi Kabupaten Jeneponto 2014-2019 .....	72
Tabel 4.4.	Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi Kabupaten Jeneponto 2014-2019 .....	74
Tabel 4.5.	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2011-2015 .....	79
Tabel 4.6.	Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 .....	80
Tabel 4.7.	Penduduk menurut Kecamatan dan Agama Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 .....	82
Tabel 4.8.	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 dan Tahun 2018 .....	83
Tabel 5.1.	Program Unggulan SIAP BISA dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018 .....	154
F	Nomor Urut Pasangan Calon Bupati-Calon Wakil Bupati Jeneponto Beserta daftar Partai Pengusung Tahun 2013 .....	84
I	Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jeneponto dari Masa ke Masa .....	92



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1.	Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan	67
GAMBAR 4.2.	Lambang Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam melaksanakan wujud penyelenggaraan pemerintahan. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut diantaranya melalui kegiatan pemilihan umum termasuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana untuk memilih calon Kepala Daerah masa depan yang langsung di pilih oleh masyarakat lokal di daerahnya.

Pilkada juga menjadi sarana untuk mengetahui kinerja petahana dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam pelaksanaan pemerintahan, serta bentuk pertanggung jawaban atas kinerja selama masa kepemimpinannya kepada rakyat yang telah memilihnya. Dalam proses Pilkada, rakyat dapat menilai apakah seorang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah layak di pilih atau sebaliknya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Namun

ng dalam pelaksanaan pemerintahan para Kepala Daerah dan



Wakil Kepala Daerah yang telah terpilih justru mengalami konflik kepentingan atau pecah kongsi.

Desentralisasi politik di Indonesia melalui pemilihan Kepala Daerah telah merubah banyak wajah perpolitikan di daerah itu sendiri mulai dari munculnya elit-elit politik lokal sampai dengan konflik kepentingan politik yang tidak lagi menjadi konsumsi elit-elit nasional. Konflik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia menandakan bahwa adanya hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Padahal tanggung jawab dan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pecah kongsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terjadi akibat kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Misalnya, Kepala Daerah minim memberikan kesempatan maupun kewenangan kepada Wakil nya, sehingga Wakil Kepala Daerah menuntut lebih dari ketentuan Undang-undang yang berlaku. Konflik kepentingan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentu saja berdampak pada pelayanan kepada masyarakat yang tidak optimal. Tentu, hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala berpengaruh pada pelayanan



Pecah kongsi dalam perjalanan pemerintahan merupakan hal yang sering terjadi. Kebersamaan ketika proses pemilihan berlangsung, hingga akhirnya terpilih, tak jarang retak di tengah jalan. Belum cukup lima tahun periode pertama masa pemerintahan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati ataupun Walikota dan Wakil Walikota kadang sudah tak akur lagi dan terlihat jalan sendiri-sendiri. Apalagi jika didalam pelaksanaan pemerintahan para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara terang-terangan menyatakan niatnya untuk maju kembali dan menjadi penantang di periode berikutnya.

Data hasil riset Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) mengindikasikan 95 persen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada langsung dari tahun 2005 hingga tahun 2013 mengalami keretakan hubungan politik sehingga melahirkan konflik kepentingan. Hasil riset LIPI mengidentifikasi tiga sebab utama pemicu lahirnya konflik kepentingan antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Pertama*, koalisi partai antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terbangun berdasarkan tujuan pragmatis semata, sekedar mendapatkan dukungan untuk lolos sebagai kandidat di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

*Kedua*, pengelolaan anggaran tim pemenangan pasangan yang tidak transparan membuat salah satunya merasa mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan yang lain sehingga mengharapkan kelak

di posisi tawar lebih besar dalam pengelolaan kewenangan Pimpinan Daerah. Besarnya biaya yang dikeluarkan selama



proses Pilkada membuat keduanya harus melakukan apapun untuk bisa mendapatkan dukungan anggaran untuk membiayai proses pemenangan. Selain faktor dana, salah seorang (Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah) merasa memiliki pengaruh lebih besar sehingga mampu meraih dukungan terbanyak. Komunikasi antar tim yang tidak transparan dan kolaboratif berujung pada saling curiga antar mereka dan kelak akan meletup setelah pelantikan. *Ketiga*, kurang jelasnya pembagian wewenang antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga mereka cenderung saling mengklaim. Dalam posisi ini, seringkali Kepala Daerah terlalu mendominasi pelaksanaan kewenangan dan cenderung tidak melibatkan wakilnya dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan strategis, dan disisi lain Wakil Kepala Daerah terlalu menuntut lebih dari ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>1</sup>

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Djohermansyah Johan mengemukakan ada sebanyak 971 Kepala Daerah yang pecah kongsi atau 94,64 persen dari 1026 Kepala Daerah yang dipilih secara langsung pada tahun 2005 hingga tahun 2013. Menurut Djohermansyah, dari hasil kajian Kementerian Dalam Negeri Kepala Daerah yang pecah kongsi meliputi sebanyak 57 pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 914 pasangan Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Walikota dan Wakil Walikota. Dari 1026

n Kepala Daerah, hanya 55 pasangan Kepala Daerah yang tetap



harmonis sampai akhir masa jabatannya dan kemudian mengikuti pemilihan Kepala Daerah periode kedua. Dari 55 pasangan Kepala Daerah itu, meliputi enam pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 49 pasangan Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Walikota dan Wakil Walikota. Dari enam pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur itu antara lain, di Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.<sup>2</sup>

Pada Pilkada serentak tahun 2018 di provinsi Sulawesi Selatan beberapa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlibat konflik kepentingan dan bersepakat untuk tidak lagi maju berpasangan yakni Moh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal MI (Kota Makassar), Iksan Iskandar-Mulyadi Mustamu (Kabupaten Jeneponto), Judas Amir-Akhmad Syarifuddin (Kota Palopo), Taufan Pawe-Andi Faisal Sapada (Kota Parepare), Muslimin Bando-Amiruddin (Kabupaten Enrekang), dan Sabirin Yahya-Andi Fajar Yanwar (Kabupaten Sinjai).

Pilkada serentak tahun 2018 tak hanya diwarnai pertarungan antara petahana Kepala Daerah dengan calon Kepala Daerah masa depan. Namun lebih didominasi oleh Wakil Kepala Daerah yang juga maju sebagai penantang utama. Begitupun juga yang terjadi di Kabupaten Jeneponto. Akibat konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati Drs. H. Iksan Iskandar M.Si dan Wakil Bupati Jeneponto H. Mulyadi Mustamu, SH berimbas pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun

Iksan Iskandar dan Mulyadi Mustamu berpisah dan tidak lagi maju

[beritasatu.com/home/971-kepala-daerah-pecah-kongsi/92263](http://beritasatu.com/home/971-kepala-daerah-pecah-kongsi/92263) Berita data Kepala Daerah Kepala Daerah pecah kongsi di akses pada hari selasa tanggal 5 Februari 2018 pukul



berpasangan. Iksan Iskandar dan Mulyadi Mustamu sudah mendeklarasikan diri untuk maju bertarung sebagai calon Bupati Jeneponto.

Pecah kongsi antara keduanya memang sangat disayangkan mengingat duet pasangan Iksan Iskandar dan Mulyadi Mustamu ini adalah duet pasangan yang secara mengejutkan mampu mengalahkan para kandidat lainnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2013. Setelah melewati perjuangan yang cukup panjang dan situasi yang memanas, akhirnya KPU Kabupaten Jeneponto pada hari Selasa, 24 September 2013 menetapkan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Drs.H. Iksan Iskandar, M.Si dan H. Mulyadi Mustamu, SH (SIAP-BISA) berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Jeneponto tahun 2013 dengan perolehan suara 102.499 atau 51,31 % menyusul Dr. Ashari Fakshirie Radjomilo, M.Si dan H. Mahlil Sikki, SE,MP (AFR-MAKI) dengan perolehan suara 89.511 atau 44,81 % dan terakhir Drs. H. Syuaib Mallombasi, MM dan H. Andi Mappatunru, SH,MH (SMART-PILAR) dengan perolehan suara 7.743 atau 6,54 % dengan jumlah partisipasi pemilih 199.753 orang pada 627 TPS.<sup>3</sup>

Sejak tiga tahun masa kepemimpinan Iksan Iskandar dan Mulyadi Mustamu, Konflik kepentingan antara mereka berdua sudah terlihat di Kabupaten Jeneponto. Menurut penulis, berdasarkan dari berbagai data

informasi awal yang didapatkan, penulis berasumsi bahwa indikasi

[www.jelajahpos.com/2013/09/rekapitulasi-rampung-iksan-mulyadi.html](http://www.jelajahpos.com/2013/09/rekapitulasi-rampung-iksan-mulyadi.html) (di sadur dari hasil hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013 di Jeneponto) di akses pada hari senin tanggal 15 januari 2018 pukul 20.00 wita.



konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto dilihat dari, *pertama* pembagian kewenangan berdasarkan kesepakatan bersama. Ketidak jelasan fungsi, peran, dan wewenang antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto semenjak masa kepemimpinannya, berakibat pada pembagian peran dan tanggung jawab yang tergantung pada kesepakatan keduanya. Bukan lagi berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku. Tak jarang, dari kesepakatan itu terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan yang tidak diterima antar keduanya. Salah satu contoh kasus ialah pembagian kewenangan dalam menyusun dan menempatkan orang-orang di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jeneponto.

*Kedua* perebutan kekuasaan. Puncak konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati ialah berpisah di Pilkada Kabupaten Jeneponto 2018. Kebersamaan antara Iksan Iskandar dan Mulyadi Mustamu pada pilkada 2013 tidak akan berlanjut kembali. Keduanya telah bersepakat untuk berpisah dan maju bertarung memperebutkan kekuasaan sebagai calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Jeneponto 2018.

Konflik kepentingan yang terjadi pada masa kepemimpinan Iksan Iskandar dan Mulyadi Mustamu membuat kebersamaan antar keduanya harus berakhir. Kebersamaan sejak Pilkada Jeneponto 2013 tidak akan kembali berlanjut. Iksan Iskandar dan Mulyadi Mustamu telah bersepakat untuk berpisah dan maju bertarung sebagai calon Bupati pada Pilkada

en Jeneponto tahun 2018 dengan pasangannya masing-masing.



Disaat situasi yang semakin memanas dan terpecah belah akibat konflik kepentingan, Iksan Iskandar dan Mulyadi Mustamu tetap berusaha menampilkan kemesraan dan kebersamaan di berbagai kegiatan, acara, dan dihadapan masyarakat Kabupaten Jeneponto agar menandakan kalau hubungan mereka baik-baik saja. Namun, disaat itu pula masyarakat mengetahui ada konflik yang terjadi antara keduanya. Mencermati konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu penelitian yang berjudul: “**KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN JENEPONTO**”



## B. Rumusan masalah

Konflik kepentingan sering dikaitkan dengan perbedaan pendapat, persaingan dalam perebutan kekuasaan, dan perbedaan kepentingan. Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tentu berimbas dalam proses pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto.

Hubungan antara Bupati Jeneponto Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si dan Wakil Bupati Jeneponto H. Mulyadi Mustamu, SH sudah mulai terlihat kurang harmonis sejak satu tahun pertama masa kepemimpinan keduanya. Kabar adanya keretakan hubungan antara keduanya bahkan sudah tersebar hingga ke kalangan masyarakat Kabupaten Jeneponto secara umum dan lingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto secara khusus.

Konflik kepentingan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto ini merupakan situasi dimana Bupati dan Wakil Bupati yang seharusnya saling berhubungan baik satu sama lain justru diperhadapkan pada pertentangan kepentingan dan dengan adanya berbagai kepentingan-kepentingan yang berbeda maka masing-masing pihak berusaha memperjuangkan kepentingannya. Tentu hal ini sangat menyalahi aturan dan ketentuan dari Undang-Undang yang berlaku mengingat mereka adalah pemimpin yang tersimpul dalam satu ikatan untuk berpasangan

antiasa wajib untuk menjalankan amanah yang telah dipercayakan



dan diberikan kepada mereka oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jenepono.

Mencermati fenomena di atas, maka dapat ditetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jenepono periode 2013-2018?
2. Bagaimana dampak konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jenepono periode 2013-2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jenepono.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak dari terjadinya konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jenepono.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Akademik

- a. Memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah melalui penelitian mengenai konflik kepentingan antara Bupati dan



Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto.

- b. Memperkaya khasanah kajian Ilmu Politik untuk perkembangan keilmuan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan masukan atau evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pemerintahan.
- b. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami dan mengkaji tentang konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual dan teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan teori yang dapat membantu proses penelitian ini. Teori yang dimaksud adalah: Teori konflik, Teori elit, Teori kelompok kepentingan, Teori kewenangan, dan tentang Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut akan di uraikan lebih lanjut dalam bab ini.

#### A. Teori Konflik

Teori konflik muncul dalam sosiologi Amerika Serikat pada tahun 1960-an yang merupakan kebangkitan kembali gagasan yang pernah diungkapkan oleh Karl Marx dan Weber. Kedua tokoh tersebut merupakan teoritis konflik. Kedua teoritis konflik ini, menolak tegas terhadap gagasan bahwa masyarakat cenderung kepada konsensus dasar atau harmoni, yang bekerja untuk kebaikan setiap orang. Mereka memandang konflik dan pertentangan kepentingan serta *concern* dari berbagai individu dan kelompok yang saling bertentangan adalah determinan utama dalam pengorganisasian kehidupan sosial.<sup>4</sup>

Istilah konflik berasal dari kata Latin *configere* yang berarti saling memukul, benturan, atau tabrakan. Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai

---

Nasir, M.S., *Teori-teori sosiologi*, Bandung: widya padjajaran, hlm.17



secara simultan.<sup>5</sup> Disatu sisi, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam Ilmu sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tak berdaya.<sup>6</sup>

Konflik dalam Ilmu Politik seringkali dikaitkan dengan perbedaan pendapat, persaingan, perebutan kekuasaan, kudeta, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga ada konflik yang tak berwujud kekerasan dan ada pula konflik yang berwujud kekerasan. Asumsi ini mendasari pernyataan bahwa konflik tidak selalu berimplikasi negatif dalam artian konflik menjadi penyebab merusak integrasi dan kesatuan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa dipihak lain ternyata konflik berimplikasi pada timbulnya integrasi masyarakat, dan sebagai sumber perubahan.

Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional. Pada saat itu Karl Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak

menyisakan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa

---

ubin dalam Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik* (Penerbit: Jakarta:Kencana. 2010)  
Soekamto, *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: rajawali press, 2007. Hal. 57.



dalam masyarakat, pada abad ke- 19 di Eropa di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (*borjuis*) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkis, kaum *borjuis* melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi.

Eksplorasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis (*false consciousness*) dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya tetap terjaga. Ketegangan hubungan antara kaum proletar dan kaum *borjuis* mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi. Ketegangan tersebut terjadi jika kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum *borjuis* terhadap mereka.<sup>7</sup>

Ralf Dahrendorf mengatakan dalam hubungan-hubungan kekuasaan beberapa orang memiliki kekuasaan sedangkan yang lain tidak.<sup>8</sup> Ada dua macam tataran konflik. Yang pertama adalah konflik laten, dimana pertentangan untuk memenuhi kebutuhan tidak terwujud dalam konflik terbuka, dan yang kedua adalah konflik manifest, yaitu jika konflik yang pertama tadi mewujud kedalam pertikaian terbuka.<sup>9</sup>

Ralf Dahrendorf adalah seorang sosiolog Jerman yang lahir pada tahun 1929. Selama kunjungannya ke Amerika Serikat (1957-1958), ia menyadur kembali teori kelas dan konflik kelas ke dalam bahasa Inggris (teori Dahrendorf semula diterbitkan dalam bahasa German).



Tommore, dkk. 1979. *Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy*. Penguin Books. page. 34  
Dahrendorf, dalam M.Polma, 2000. *Sosiologi kontemporer*, hal. 134.  
Dahrendorf, dalam bukunya Soeryono Soekanto, 1995. *Sosiologi suatu pengantar*. PT. Raja Grafindara. Jakarta. Hal. 111.

Dahrendorf adalah sarjana Eropa yang sangat memahami teori Marxian. Tetapi, bagian ujung teori konfliknya terlihat menyerupai cerminan fungsionalisme struktural ketimbang teori Marxian tentang konflik.

Karya utama Dahrendorf adalah *Class and Class Conflict in Industrial Society* (1959) adalah bagian paling berpengaruh dalam teori konflik, tetapi pengaruh itu hanya sebagian besar, karena ia banyak menggunakan logika struktural-fungsional yang memang sesuai dengan logika sosiolog aliran utama. Artinya, tingkat analisisnya sama dengan fungsionalis struktural (tingkat struktur dan institusi) dan kebanyakan masalah yang diperhatikan pun sama. Dengan kata lain fungsionalisme struktural dan teori konflik adalah bagian dari paradigma yang sama.

Dahrendorf mengakui bahwa meski aspek-aspek sistem sosial dapat saling menyesuaikan diri dengan mantap, tetapi dapat juga terjadi ketegangan dan konflik di antaranya. Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial (sebagian dari suatu keseluruhan), dan menganggap teori ini merupakan perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena sosial.

Dahrendorf telah melahirkan kritik penting terhadap pendekatan yang pernah dominan dalam sosiologi, yaitu kegagalannya di dalam menganalisa masalah konflik sosial. Dia menegaskan bahwa proses konflik sosial itu merupakan kunci bagi struktur sosial. Dahrendorf telah



berperan sebagai suara teoritis utama yang menganjurkan agar perspektif konflik digunakan dalam memahami fenomena sosial dengan lebih baik.<sup>10</sup>

Dahrendorf melihat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan: “seluruh aktifitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan kelompoknya dan masyarakatnya disebabkan dari terjadinya konflik antara kelompok dan kelompok, individu dan individu serta antara emosi dan emosi didalam diri individu”.<sup>11</sup> Konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada namun demikian, dalam interaksi antar masyarakat juga terjadi kesepakatan atau kerjasama yang sering disebut dengan konsensus.

Dahrendorf juga mengatakan bahwa masyarakat berisi ganda, yakni memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama sehingga dalam memperebutkan kekuasaan politik, elit dan kelompok elit akan menghadapi dua kondisi, yakni konflik dan konsensus. Di satu sisi, elit politik akan menghadapi perbedaan, persaingan dan pertentangan dengan elit lainnya, disisi lain juga memungkinkan terjadinya kerjasama atau konsensus di antara politik yang saling menguntungkan, sehingga kebutuhan dan kepentingan setiap elit politik terakomodasi.<sup>12</sup> Menurut Ralf

---

<sup>10</sup> <http://repository.uin-malang.ac.id/729/1/Metateorizing%3B%20Teori%20Konflik%20%28Ralf%20Dahrendorf%29.pdf>  
ng Teori Konflik Ralf Dahrendorf. Aniek Rahmah. Jurnal. Hal 7. Di akses pada hari sabtu  
ebruari 2018 pukul 13.00 wita.

rah. 2015. *Konflik kepentingan dalam perebutan lahan pertambangan di kabupaten (studi kasus masyarakat adat To Karunsi'e dengan PT. Vale Indonesia.Tbk)*. Program Politik Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas n.



Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut :

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
4. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.<sup>13</sup>

Konflik merupakan fakta sosial, yang eksistensinya dalam masyarakat disebabkan oleh adanya perbedaan otoritas (wewenang), kepentingan, dan posisi. Perbedaan wewenang dan posisi inilah yang menyebabkan adanya benturan kepentingan. Dengan demikian konsep sentral teori konflik Ralf Dahrendorf adalah wewenang, posisi, dan kepentingan (*interest*).<sup>14</sup>

Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik terjadi karena adanya distribusi kewenangan yang tak merata dan tidak sesuai pada porsinya, sehingga bertambah kewenangan pada suatu pihak dan dengan sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Oleh karena itulah para



---

rt H. Lauer, 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta,  
Ritzer, 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: CV. Rajawali,

penganut teori konflik berkeyakinan bahwa konflik merupakan gejala serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat itu sendiri, karena ia melekat pada masyarakat itu sendiri, maka konflik tidak akan dapat dilenyapkan yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat adalah mengatur konflik itu agar konflik yang terjadi antar kekuatan sosial dan politik tidak berlangsung secara kekerasan. (Ramlan Surbakti, 1999:20).<sup>15</sup> menurut Maswadi Rauf, sumber konflik terjadi karena adanya struktur yang dikuasai dan menguasai dan adanya keterbatasan sumber daya.<sup>16</sup>

Konflik merupakan suatu situasi dimana aktor-aktor yang saling berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan kepentingan dan masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya. Namun jebakan kekuasaan menimbulkan ketidakadilan yang pada gilirannya menjadi sumber kekerasan, baik atas nama keadilan maupun ketidakadilan.<sup>17</sup>

Konflik dengan menggunakan kekerasan terjadi dalam suatu masyarakat karena adanya “perasaan” dirampas yang menimbulkan ketidakpuasan.<sup>18</sup> Konflik juga dapat dikatakan sebagai pertentangan oleh karena terjadi perbedaan antara dua atau lebih, baik individu maupun kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dan berusaha menjadi dominan atas pihak lain. Maswadi Rauf menyebutkan

---

, Arma. 2010. *Konflik Kepentingan Elit Politik Pasca Pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Wajo Tahun 2008*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Hal.

rauf. *Konsensus Politik: Sebuah penjajakan teoritis*. DEPDIKNAS. 2000. Hal 23.  
Chandra, *konflik dalam kehidupan sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius, 1992. Hal. 20.  
stino, 2007. *Perihal Ilmu Politik*, Yogyakarta. PT. Graha Ilmu. Hal. 208.



ada empat prasyarat yang harus terpenuhi agar sebuah hubungan sosial dapat dikatakan sedang mengalami konflik, ia mencirikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Ada dua pihak yang terlibat.
2. Mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi.
3. Mereka menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan menghancurkan, melukai, menghalang-halangi lawannya.
4. Interaksi yang bertentangan itu bersifat terbuka sehingga bisa dengan mudah dideteksi oleh pengamat independen.

## 1. Bentuk-bentuk konflik

Berdasarkan sifatnya, bentuk konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

### a. Konflik Destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain.

### b. Konflik Konstruktif

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan

menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut



---

<sup>19</sup> M. Rauf, *Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Politik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000. Hal. 7.

dan menghasilkan suatu kesepakatan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.<sup>20</sup>

## 2. Faktor-faktor penyebab konflik

Beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

- a. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu.<sup>21</sup> Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan fisik, tetapi bisa pula diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Didalam realitas sosial tidak satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.
- b. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan



---

rt H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001, Hal. 68  
arwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2005, hal. 68

adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan social sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

- c. Perbedaan kepentingan, mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.

### 3. Dampak Positif dan Negatif Konflik

Dampak Konflik Menurut (Fisher, 1964 : 60), dimana suatu konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi ada kalanya konflik juga memiliki dampak positif.

Dampak positif dari suatu konflik yaitu:

- a. Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas.
- b. Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara anggota kelompok.
- d. Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu atau kelompok.
- e. Konflik juga dapat memunculkan kompromi baru.



Dampak negatif dari suatu konflik yaitu sebagai berikut:

- a. keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok.
- b. Kedua, kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
- c. Ketiga, berubahnya kepribadian para individu atau anggota kelompok.
- d. Keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

#### 4. Bentuk-bentuk pengendalian konflik

Menurut Nasikun<sup>22</sup>, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada enam yaitu:

##### 1. Konsiliasi (*conciliation*)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

##### 2. Mediasi (*mediation*)

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-



2003. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.25.

nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

### 3. Arbitrasi

Arbitrasi berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (*arbiter*) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.

### 4. Perwasitan

Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

### 5. Paksaan (*Coercion*)

Paksaan ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau psikologis. Pihak yang bisa menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang dan bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh.

### 6. *Detente*

*etente* berasal dari kata Perancis yang berarti mengendorkan, yang berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang



bertikai guna persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian.

Salah satu jenis konflik sosial adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi diakibatkan oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam upaya memperoleh otoritas atau kekuasaan yang saling bersinggungan.

Menurut Wallase dan Alison, teori konflik memiliki tiga asumsi utama yang saling berhubungan:

1. Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu.
2. “Power” bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata sebagai sumber konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa (*coercive*). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak memperoleh sama sekali.
3. Ideologi dan nilai-nilai dipandanginya sebagai senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.

Dari asumsi diatas tergambar jelas bahwa dengan adanya berbagai gan-kepentingan yang berbeda, maka pihak tersebut berusaha



dengan berbagai cara untuk mencapai kepentingannya, termasuk dalam konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati Jenepono.

Timbulnya konflik kepentingan menurut pandangan Ralf Dahrendorf (Pruit Dean J and Rubin Jeffrey Z, 2004:151) berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi para penghuni mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta pada posisi lain para penghuni menjadi sasaran perintah. Perbedaan ini berhubungan baik sekali dengan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan/kewenangan yang melahirkan konflik kepentingan itu. Dalam setiap organisasi atau perkumpulan, hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan yakni kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Ketika kepentingan keduanya bersinggungan, maka konflik dapat terjadi antara kedua pihak tersebut.

Dapat dikatakan bahwa konflik kepentingan intinya adalah pertentangan dan ketegangan yang muncul pada waktu membagi sesuatu yang langka misalnya kedudukan, kekuasaan (Jabatan) dan kewenangan. Maswadi Rauf juga mengemukakan bahwa konflik terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber yang langka (*resource and position security*).



berdasarkan berbagai macam teori yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam konteks masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini

penulis cenderung menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf, penulis memposisikan teori sesuai dengan masalah yang diangkat dan bertujuan menjawab pertanyaan serta membahas masalah yang berkaitan penyebab dan dampak yang ditimbulkan pada konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. Misalnya menjawab dan membahas masalah tentang distribusi kewenangan yang tak merata dan suatu situasi dimana aktor-aktor yang saling berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan kepentingan dan masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya.

## **B. Teori Elit Politik**

Teori elit politik lahir dari diskusi seru para ilmuwan sosial Amerika pada tahun 1950-an, antara Schumpeter (ekonom), Lasswell (ilmuwan politik) dan sosiolog C. Wright Mills, yang melacak tulisan-tulisan dari para pemikir-pemikir eropa masa awal munculnya fasisme, Khususnya Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Italia), Roberto Michels (seorang Jerman keturunan Swiss) dan Jose Ortega Y, Gasset (Spanyol).

Suzanne Keller<sup>23</sup> mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa golongan elite itu adalah tunggal yang biasa disebut elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto). Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan



<sup>23</sup> Nas. *Konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal*, Jakarta: Pustaka Assaile Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Penerbitan Unhas (LEPHAS). Hal.33

hak-hak atau imbalan (ahlinya adalah Saint Simon, Karl Mainnheim, dan Raymond Aron).

Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.<sup>24</sup>

Pareto (1848-1923) percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit.

Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan Lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam hal matematika, bidang musik, Karakter moral dan sebagainya. Karena itu

pareto, Masyarakat terdiri dari 2 kelas:

l. 34



- 1) Lapisan atas : yaitu elit, yang terbagi kedalam elit yang memerintah (*governing elit*) dan elit yang tidak memerintah (*non governing elit*).
- 2) Lapisan yang lebih rendah : yaitu non-elit.

Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurut dia, berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting.

Menurut Pareto elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Elite politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik.
2. Elite non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.

ajian tentang elit politik juga lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang membangun teori elit politik. Menurut Mosca, dalam semua



masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.<sup>25</sup>

Konsep pergantian (sirkulasi) elit juga dikembangkan oleh Pareto. Dalam setiap masyarakat ada gerakan yang tidak dapat ditahan dari individu-individu dan elit-elit kelas atas hingga bawah, dan dari tingkat bawah ke tingkat atas yang melahirkan suatu "peningkatan yang luar biasa pada unsur-unsur yang melorotkan kelas-kelas yang memegang kekuasaan, yang pada pihak lain justru malah meningkatkan unsur-unsur kualitas superior; pada kelompok-kelompok (yang lain)".

Ini menyebabkan semakin tersisihnya kelompok-kelompok elit yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, keseimbangan masyarakat pun menjadi terganggu. Kiranya inilah yang menjadi perhatian utama Pareto. Pada bagian lain ia juga mengemukakan tentang berbagai jenis pergantian antara elit, yaitu pergantian ; (i) diantara kelompok-kelompok elit yang memerintah itu sendiri dan (ii) diantara elit dengan penduduk lainnya.

an yang terakhir itu bisa berupa pemasukan : (a) individu-individu



dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elit yang sudah ada, dan/atau (b) individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada. Tetapi apa sebenarnya yang menyebabkan runtuhnya elit yang memerintah, yang merusak keseimbangan sosial, dan mendorong pergantian elit?. Pareto menjawab pertanyaan ini dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sifat psikologis berbagai kelompok elit yang berbeda. Dalam hubungan inilah Pareto mengembangkan konsep residunya.

Konsep tersebut didasarkan pada perbedaan yang digambarkannya terjadi di antara tindakan yang "logis" dan "non logis" (lebih daripada "rasional" dan "non-rasional") dari individu-individu dalam kehidupan sosialnya. Yang dimaksudkan dengan tindakan yang logis adalah tindakan-tindakan yang diarahkan pada tujuan-tujuan yang dapat diusahakan serta mengandung maksud pemilikan yang pada akhirnya dijangkau.

Dapat dikatakan bahwa tindakan non-logis adalah tindakan-tindakan yang tidak diarahkan pada suatu tujuan atau diarahkan pada usaha-usaha yang tidak dapat dilakukan, atau didukung oleh alat-alat yang tidak memadai guna melaksanakan usaha tersebut. Yang dimaksud dengan residu sebenarnya adalah kualitas-kualitas yang dapat

atkan taraf hidup seseorang, dan sementara dia menyusun suatu "residu" dia mengikatkan kepentingan utamanya pada residu



"kombinasi" dan residu "keuletan bersama" dengan bantuan elit yang memerintah yang berusaha melestarikan kekuasaannya.

Residu "kombinasi" dapat diartikan sebagai kelicikan dan residu "keuletan bersama" berarti kekerasan, menurut pengertian yang sederhana. Pareto juga telah menggambarkan kedua elit tersebut sebagai para "spekulator" dan para "rentenir". Perilaku mereka menunjukkan karakteristik yang mirip dengan cara yang dikedepankan Machiaveli dalam membentuk klik-klik pemerintah sebagai "rubah" dan "singa". Terdapat dua tipe elit, yaitu mereka, yang memerintah dengan kelicikan dan yang memerintah dengan cara paksa. Didalam usahanya untuk mengesahkan ataupun merasionalkan penggunaan kekuasaan mereka, elit-elit ini melakukan "penyerapan" atau menggunakan mitos-mitos yang mereka ciptakan untuk mengelabui massa guna memperalatnya.

Dapat dikatakan "penyerapan" adalah cara-cara dimana tindakan-tindakan yang ditentukan oleh residu dirumuskan guna memahami munculnya tindakan-tindakan yang logis. Ketertarikannya dalam masalah ini, seperti halnya ketika dia membahas keseimbangan sosial, menambah keyakinan Pareto akan pentingnya sirkulasi elit dari waktu ke waktu.<sup>26</sup>

Berdasarkan berbagai macam teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam konteks masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan teori elit Pareto. Penulis memposisikan

sesuai dengan masalah yang diangkat dan bertujuan menjawab

---

SP. 2003. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hal: 199



pertanyaan serta membahas masalah yang berkaitan hubungan antar elit politik maupun elit masyarakat dalam konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto.

### C. Teori kelompok kepentingan

Kelompok-kelompok kepentingan muncul pertama kali pada awal abad ke-19. Dulu disebut kelompok penekan (*pressure group*), akan tetapi karena muncul anggapan bahwa tidak semua kelompok kepentingan mengadakan penekanan, dewasa ini masyarakat lebih cenderung memakai istilah kelompok kepentingan. Sekelompok orang yang mendirikan organisasi yang bertujuan tertentu berusaha mempengaruhi proses kebijakan pemerintah. Kelompok kepentingan biasanya bersaing dengan kelompok kepentingan yang lain.

Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menguasai pemerintahan, sedangkan hanya ingin mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kelompok kepentingan memegang peranan yang sangat besar dalam demokrasi, bahkan kelompok kepentingan nyatanya lebih berpengaruh dalam mengambil keputusan daripada institusi pengambil keputusan formal (resmi). Ini terjadi karena pada kenyataannya pengaruh individu dalam proses pengambilan keputusan sangatlah kecil. Maka untuk memuaskan kebutuhan, individu-individu akan menggabungkan

kedalam sebuah kelompok kepentingan. Oleh karena itu, cara efektif untuk memperjuangkan kepentingan adalah bergabung



membentuk kelompok kepentingan. Lebih efektif bila kelompok tersebut bisa memiliki kekuatan penekan (*pressure group*).

Menurut Gabriel Almond, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik, sedangkan kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat serta menghindari keputusan yang merugikan. Secara sederhana yang dimaksud dengan kelompok kepentingan (*interests group*) ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan.

Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam buku *Comparative Politics Today: A World View* (1992)<sup>27</sup>, membagi kelompok kepentingan atas 4 kategori, yaitu:

1. Kelompok kepentingan Anomik

Kelompok anomik muncul secara kebetulan (*incidental / temporer*), bersikap informal, muncul karena adanya isu tertentu, anggotanya muncul dan menghilang tidak tertentu, bekerja tidak teratur.



an H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia Yogyakarta: PT. Graha Ilmu. Hlm. 88

Contoh : Persatuan pedagang yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi.

## 2. Kelompok kepentingan Non-Asosiasional

Suatu kelompok kepentingan yang bersifat informal, memiliki suatu lembaga atau organisasi yang agak sedikit mapan, anggotanya berasal dari faktor keturunan dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota.

Contoh : Persatuan warga Makassar di Balikpapan.

## 3. Kelompok Kepentingan Institusional (Kelembagaan)

Kelompok yang memiliki suatu organisasi yang telah mapan, kegiatan yang teratur, jaringan organisasi yang luas, tujuan organisasi yang luas, kepemimpinan yang terseleksi.

Contoh : KORPRI, PGRI, TNI, POLRI, dll.

## 4. Kelompok Kepentingan Asosiasional

Kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, memiliki lembaga yang mapan, menggunakan tenaga professional, memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan, kepemimpinan yang terseleksi dan tujuan yang bersifat khusus.



Contoh : Ikatan Dokter Indonesia, termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha<sup>28</sup>.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ahli dalam konteks masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan teori kelompok kepentingan Gabriel Almond. Penulis memosisikan teori sesuai dengan masalah yang diangkat dan bertujuan menjawab pertanyaan serta membahas masalah yang berkaitan kelompok kepentingan dalam konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat serta menghindari keputusan yang merugikan.

#### **D. Teori Kewenangan**

Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh itu dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, maka kewenangan merupakan hak



[edia.neliti.com/media/publications/31309-ID-kelompok-kepentingan-dalam-proses-pemerintahan-di-daerah-studi-kasus-per.pdf](http://media.neliti.com/media/publications/31309-ID-kelompok-kepentingan-dalam-proses-pemerintahan-di-daerah-studi-kasus-per.pdf) di akses pada hari jum'at tanggal 2 februari 13.00 wita.

moral yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangan.

Prinsip moral bersifat lebih spesifik daripada nilai-nilai umum. Prinsip moral dapat berwujud hukum yang tertulis, dan dapat pula berwujud tradisi dan hal-hal yang dianggap baik lainnya yang tak tertulis. Prinsip moral memberikan hak untuk memerintah kepada orang atau kelompok tertentu. Prinsip moral mengatur perilaku yang memerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan juga mengatur perilaku rakyat yang diperintah.

Setiap masyarakat mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai. Inilah yang disebut nilai-nilai.

- a. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan disebut tugas.
- b. Hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan disebut kewenangan.
- c. Tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara disebut fungsi.
- d. Fungsi biasanya melekat pada lembaga-lembaga pemerintahan, seperti badan-badan perwakilan rakyat, presiden, menteri-menteri, birokrasi, pejabat-pejabat tinggi negara, dan pengadilan.

Wewenang merupakan kekuasaan yang sah. Max Weber yang dianggap sebagai bapak birokrasi mengungkapkan tiga macam tipe ideal

ng, yaitu :



1. Wewenang Tradisional adalah wewenang yang dapat dimiliki oleh manusia maupun kelompok manusia. Wewenang ini dimiliki oleh orang-orang yang sudah lama sekali memiliki kekuasaan di dalam masyarakat. Wewenang ini dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang bukan karena memiliki kemampuan khusus, namun wewenang ini dimiliki karena memiliki kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga bahkan telah menjiwai masyarakat.
2. Wewenang Karismatik adalah wewenang yang tidak diatur oleh kaidah atau aturan, baik yang tradisional maupun yang rasional. Sifat dari wewenang karismatik cenderung irasional atau tidak masuk akal. Terkadang karisma tersebut hilang karena masyarakat yang berubah dan memiliki paham yang berlainan. Namun perubahan inilah menjadi faktor yang tidak dapat diikuti oleh orang-orang yang memiliki wewenang karismatik, sehingga dia tertinggal oleh kemajuan dan perkembangan masyarakat.
3. Wewenang Legal-Rasional adalah wewenang yang disandarkan pada sistem atau aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Wewenang inilah yang menjadi basis wewenang pemerintahan. Oleh karena itu, birokrasi didominasi oleh semangat formalistic-impersonality. Segala kewenangan yang dimiliki oleh seseorang didasarkan pada hukum yang berlaku, hal ini diatur juga agar pemilik kewenangan itu tidak berlaku semena-mena.



### a. Sumber Kewenangan

Sumber kewenangan untuk memerintah diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, hak memerintah berasal dari tradisi, artinya kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus-menerus dalam masyarakat. Kepercayaan yang mengakar ini berwujud keyakinan bahwa yang ditakdirkan menjadi pemimpin masyarakat ialah keluarga tertentu, dan yang dianggap memiliki “darah biru”.

*Kedua*, hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa atau Wahyu. Atas dasar itu, hak memerintah dianggap bersifat sakral. Orang yang berkuasa berusaha menunjukkan kepada khalayak bahwa kewenangannya memerintah masyarakat berasal dari kekuatan yang sakral.

*Ketiga*, hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang populer maupun karena memiliki kharisma, sehingga menimbulkan pesona dan daya tarik bagi anggota masyarakat. Pemimpin ini biasanya mampu memukau massa dengan penampilan dan kemampuan retorikanya.

*Keempat*, hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan. Apabila seseorang menjadi kepala pemerintahan

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sumber kewenangannya berupa hukum.



*Kelima*, hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan. Asumsinya adalah, orang yang tidak memiliki keahlian akan patuh pada orang yang memiliki keahlian. Orang kaya akan dapat menjalankan pemerintahan bukan untuk kepentingan sendiri karena dia sudah menikmati kepuasan dari kekayaannya, tetapi untuk masyarakat umum.

Kelima sumber kewenangan itu disimpulkan menjadi 2 (dua) tipe kewenangan utaman yaitu kewenangan yang bersifat prosedural dan kewenangan yang bersifat substansial. Yang pertama adalah hak memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis maupun tak tertulis. Sedangkan yang kedua adalah hak memerintah yang berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin, seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi dan instrumental.

#### **b. Peralihan Kewenangan (*Succession*)**

Menurut Paul Conn secara umum terdapat 3 (tiga) cara peralihan kewenangan.

*Pertama*, secara turun-temurun, yakni jabatan dan kewenangan dialihkan kepada keturunan atau keluarga pemegang jabatan terdahulu.

*Kedua*, dengan pemilihan, biasanya dilakukan secara langsung melalui badan perwakilan rakyat. Hal ini dipraktekkan dalam sistem politik demokrasi.

*Ketiga*, dengan paksaan, dialihkan kepada orang atau kelompok k menurut prosedur yang sudah disepakati, melainkan dengan



menggunakan kekerasan, seperti revolusi dan kudeta, dan ancaman kekerasan (paksaan tak berdarah). Cara ini lazimnya berlangsung dalam masyarakat-negara yang sistem politiknya belum stabil.

### c. Sikap terhadap Kewenangan

Pada umumnya sikap atas kewenangan dikelompokkan dalam sikap menerima, mempertanyakan (skeptis), dan kombinasi keduanya. Di bawah ini contoh dari Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia tentang sikap-sikap anggota masyarakat terhadap kewenangan yang bersifat prosedural maupun yang bersifat substansial (pribadi).

*Pertama*, sikap masyarakat Amerika Serikat terhadap kewenangan prosedural merupakan perpaduan antara sikap legalistik dan skeptis atas hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Terhadap kewenangan pribadi, mereka juga menunjukkan sikap mendua. Di satu pihak mereka menolak kewenangan hanya karena orang itu memiliki kualitas pribadi karena kharisma maupun popularitas pribadi, di pihak lain apabila orang itu terpilih berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang mereka akan menerima dan mendukung kewenangan tersebut.

*Kedua*, sikap masyarakat Inggris atas kewenangan prosedural tidak sekental sikap warga Amerika Serikat karena Inggris tidak memiliki konstitusi. Sejalan dengan itu, sikap masyarakat Inggris terhadap

ngan pribadi dapat dikatakan menerima sebagaimana terbukti atas ngan kerajaan.



*Ketiga, sikap* masyarakat Indonesia, misalnya masyarakat suku Jawa cenderung menerima kewenangan pribadi, sedangkan masyarakat dari Minang dan Batak cenderung menerima kewenangan prosedural dan hukum adat. Pada umumnya orang kota lebih kritis terhadap kewenangan daripada orang desa. Begitu pula dengan kaum terpelajar, karena lebih dekat dengan pusat kekuasaan dan informasi sehingga lebih mengetahui tindakan pihak yang berwenang.<sup>29</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ahli dalam konteks masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan teori kewenangan Max Weber. Penulis memposisikan teori sesuai dengan masalah yang diangkat, khususnya tentang konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. Teori yang digunakan bertujuan untuk menjawab pertanyaan serta membahas masalah yang berkaitan tentang kewenangan.

#### **E. Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Walikota.

Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang

---

Surbakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo. Hal: 85-90.



Pemerintahan Daerah. Tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah:

Kepala Daerah:

1. Kepala Daerah mempunyai tugas:<sup>30</sup>
  - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan



f 3 Pasal 65, 66, dan 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang  
han Daerah



7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah.

Wakil Kepala Daerah:

1. Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas:
  - a. membantu kepala daerah dalam:
    - 1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
    - 2) mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
    - 3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
    - 4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan



- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain melaksanakan tugas, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga berhak

memperoleh fasilitas, sebagai berikut:

1. Gaji dan Tunjangan



- b. Biaya sarana dan prasarana (rumah jabatan)
- c. Sarana mobilitas (kendaraan dinas)
- d. Biaya operasional<sup>31</sup>

Untuk biaya rumah jabatan, kendaraan dinas, serta biaya operasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di luar rumah jabatan (seperti sewa rumah lain) tidak ditanggung oleh APBD.

Berdasarkan konteks masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan masalah yang diangkat dan bertujuan menjawab pertanyaan serta membahas masalah yang berkaitan tentang tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto.

#### **F. Penelitian terdahulu**

Penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang relevan yang memberikan gambaran tentang apa yang ingin diteliti oleh penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu membantu penulis agar dapat memperkaya teori dan konsep yang digunakan dari penelitian terdahulu, serta penulis mempunyai acuan yang jelas dan

dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa

\_\_\_\_\_  
Pasal 4,5,6,7,8,9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang  
n Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

**Tabel 1.  
Penelitian Terdahulu**

NO	Judul Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian
1	Konflik antar Elite Lokal di Sulawesi Selatan: Sebuah Perspektif Sejarah	Jayadi Nas, 2014	Konflik elite merupakan kajian yang menarik di kalangan para ilmuwan dan praktisi sosial, sejak dahulu hingga sekarang. Konflik antar elite politik lokal juga senantiasa muncul dalam lanskap perpolitikan di Indonesia. Konflik antar elite politik lokal menjadi fenomena baru di era Reformasi (1988 – sekarang), yang jarang ditemukan pada masa-masa sebelumnya, baik pada masa Orde Lama (1959-1966) maupun pada masa Orde Baru (1966-1998). Penulisan ini bertujuan untuk menemukan adanya kontinuitas dan pergeseran pola konflik melalui penelusuran sejarah. Berdasarkan penelusuran sejarah, pengkajian dan analisis terhadap konflik antar elite politik lokal, baik pada zaman sebelum penjajahan, zaman penjajahan, maupun zaman kemerdekaan Indonesia (1945-1950), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontinuitas dan pergeseran pola konflik elite dari setiap zaman di Sulawesi Selatan. Kontinuitas pola konflik dapat dilihat dari pertentangan antar suku/wilayah dalam perebutan kekuasaan, yang terjadi sejak zaman penjajahan sampai saat ini. Pergeseran pola konflik dapat dilihat dari perubahan konflik elite yang sebelumnya bersifat vertikal (kelompok bangsawan dengan masyarakat biasa) menjadi konflik horizontal, yakni konflik antar kelompok kepentingan yang tidak



			lagi didasarkan pada strata sosial, seperti yang terjadi masa-masa sebelumnya.
2	Konflik Tiga Elite Penentu Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar 2013	Armin Arsyad, Gustiana A. Kambo, Endang Sari.	Pemilihan Walikota Makassar pada tahun 2013 diwarnai oleh konflik elit politik yang menjadi aktor penentu di partai. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis polarisasi konflik yang terjadi di antara ketiga elite penentu dan menganalisis apa yang menjadi motif ketiga elite penentu tersebut berkonflik pada pemilukada Makassar 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif untuk menggambarkan persaingan tiga elit. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat kontekstual dan menekankan pemaknaan fenomena interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polarisasi hadir ketika terjadi perebutan kekuasaan antar elit. Polarisasi mengarah pada dua ranah arena kekuasaan. Pertama, polarisasi secara internal partai dimana terjadi persaingan antar elit partai untuk menjadi distributor utama alokasi sumber-sumber kekuasaan. Kedua secara eksternal dimana elit antar partai, baik secara individu maupun atas nama institusi kepartaian saling berebut pengaruh untuk menguasai sumber daya kekuasaan yang lebih besar dan lebih luas, dengan menempatkan kandidat mereka pada sumber utama kekuasaan. Sementara motif di balik konflik tiga elit di Pemilihan Umum Walikota Makassar adalah upaya mempertahankan monohirarcial kekuasaan dan poliarki kekuasaan.
	Analisa Tentang Perpecahan Pasangan Bupati Dan	Sri Wahyuni Wildah, H. Muhammad Ridwan,	Analisis abstrak bertajuk perpecahan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2003 - 2008 di Kabupaten Indragiri Hilir ditulis untuk mengetahui



Wakil Bupati  
Periode 2003-  
2008 Di  
Kabupaten  
Indragiri Hilir.

Universitas  
Riau.

penyebab pemisahan pasangan pemimpin daerah di kabupaten tersebut. Inhil pada Pemilu 2008 dengan penelitian berlangsung di Kabupaten Inhil. Di era otonomi daerah, Pilkada dilakukan secara langsung. Dan pemimpin pemerintahan yang sering dijumpai pasangan berpisah bahkan berlomba pada akhir masa kepemimpinannya. Ini adalah masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori dan peraturan tentang konflik hadari nawawi. konflik terjadi karena perbedaan ketidakcocokan pribadi dalam sistem nilai, batas yang tidak jelas - batas wewenang dan tanggung jawab, dan sebagainya. Membuat elit di pemerintahan terlibat dalam konflik yang hanya akan melemahkan posisi pemerintah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bermaksud mencari fakta - banyak untuk kemudian disimpulkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang dianggap tahu banyak tentang masalah dalam perawatan. Ada juga data sekunder yang diperoleh dari instansi yang terlibat dalam penelitian. Berdasarkan temuan di kabupaten. Inhil, pemimpin pemerintah mitra berpisah karena ketidakcocokan pribadi, perbedaan sistem nilai, perbedaan gaya kepemimpinan, dan memicu persaingan pemasaran politik yang nyata dalam pemilu 2008. Dapat dilihat bahwa berdasarkan Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER) sesuai pasal 56 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004, yang melibatkan seluruh masyarakat, antara dua kepala pemerintahan (Kepala Daerah dan Wakil Kepala) Bersaing



			<p>untuk posisi Kapolda periode sebelumnya. Jadi, pemimpin persatuan keluarga pemerintah dapat menciptakan individu - masing-masing pihak dapat mempersatukan ketidakcocokan di antara keduanya. Persaingan antara pasangan incumbent sering terjadi saat ini. Dengan menggunakan teori kekuasaan (Deliar Noer) dan konflik (Hadari Nawawi), penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran atau paradigma dalam memilih pemimpin pemerintahan mitra agar pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan dan integritas pimpinan pemerintah, mitra tetap terjaga.</p>
4	<p>Konflik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010-2012</p>	<p>Angga Aditya Nugraha, Universitas Diponegoro.</p>	<p>Pemilu merupakan instrumen penting dalam membangun demokrasi, untuk pemilihan umum dan pemilihan di Indonesia telah dilaksanakan dengan prinsip luber dan jurdil. Meski begitu, keberhasilan yang diraih tidak mengesampingkan kenyataan bahwa mereka melanggar, kecurangan, dan konflik yang telah terjadi. Konflik dalam pemilihan di kotamadya barat adalah contoh pemilihan konflik dalam bahasa Indonesia. Konflik antara kandidat dan masyarakat. Sasaran penelitian adalah konflik rekonstruksi yang telah terjadi di lapangan menjadi bentuk karya ilmiah dengan menjelaskan dinamika konflik dan faktor-faktor yang menyangkut pemilihan konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Informan yang dipilih sosialita adalah peran politik dalam konflik dan masyarakat kotamadya kabupaten barat dan dukungan oleh kandidat. Hasilnya menunjukkan bahwa konflik dalam pemilihan di kotamadya kabupaten barat berkepanjangan. Langkah-langkah</p>



			<p>prasyarat konflik, praktik politik uang, hari pemilihan, tuntutan hukum ke pengadilan konstitusional, para aktor bermain, keputusan ketegangan oleh pengadilan konstitusional dan fasilitas pembakaran pemerintah. Konflik yang disebabkan oleh keputusan komisi pemilihan, pengadilan konstitusi penghargaan dan peresmian di pusat. Rekomendasi yang dapat diberikan keputusan pengadilan konstitusi lebih baik melakukan pemilihan ulang dan keputusan kementerian di dalam negeri lebih baik melibatkan pemerintah daerah dan menunjuk bupati dan wakil bupati di kotawaringin kabupaten barat dan melibatkan masyarakat setempat.</p>
5	<p>Pecah Kongsi Bupati Dan Wakil Bupati Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Sidoarjo (Studi Rational Choice Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sidoarjo).</p>	<p>Zadit Taqwa, Universitas Airlangga.</p>	<p>Penelitian yang berjudul “Pecah Kongsi Bupati dan Wakil Bupati Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sidoarjo (Studi Rational Choice Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo)” ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui in depth interview, observasi, studi dokumentasi dan studi literatur. Untuk menganalisis fenomena pecah kongsi penulis menggunakan dua teori yaitu teori rational choice serta faksionalisasi elit, tujuannya adalah agar mampu mendalami fenomena tersebut. Penelitian terkait pecah kongsi memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang mengapa terjadi fenomena pecah kongsi serta faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pecah kongsi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo 2015. Pecah kongsi merupakan kondisi yang sering terjadi ketika menjelang pencalonan kepala daerah. Pecah kongsi antara Bupati Saiful’illah dan Wakil Bupati M.G Hadi Sucipto terjadi karena</p>



masing-masing berangkat untuk mencalonkan diri dari jalur partai yang berbeda. Dalam memutuskan melakukan pecah kongsi Saiful'illah dan M.G Hadi Sucipto tentu melihat dari rasionalitas yang ada, seperti halnya pertimbangan memiliki elektabilitas dan akuntabilitas yang cukup baik serta memiliki konstituen di daerah masing-masing sehingga dengan rasionalitas tersebut keputusan untuk melakukan pecah kongsi adalah keputusan yang tepat. Ada tiga hal yang menjadi sudut pandang pilihan rasioanal yang dilakukan dalam keputusan pecah kongsi antara lain, peran partai, figur serta perhitungan politik. Kasus pecah kongsi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih menarik karena Saiful'illah dan M.G Hadi Sucipto merupakan kader partai yang sama yaitu PKB, meskipun M.G Hadi Sucipto merupakan kader mukhtasar atau kader kehormatan karena pada pilkada sebelumnya menjadi pasangan Saiful'illah. Kondisi pecah kongsi tersebut tentu akan menimbulkan faksi-faksi terutama para elit didalam internal PKB, baik yang pro dan kontra terhadap keputusan pecah kongsi.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu diatas yang relevan. Dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sangat berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu terutama dalam hal pokok pembahasan penelitian, lokasi penelitian, dan metode penelitian. Namun, dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu diatas terdapat kesamaan dalam hal teori dan konsep yang akan digunakan oleh



peneliti dalam melakukan penelitian. Seperti teori konflik dan teori elit politik.

### G. Kerangka Pikir

Konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan fenomena yang juga sering terjadi dalam perjalanan dan proses pelaksanaan pemerintahan di beberapa daerah-daerah di Indonesia. Kebersamaan ketika proses pemilihan berlangsung, hingga akhirnya terpilih, tak jarang retak di tengah jalan. Belum cukup lima tahun periode pertama masa pemerintahan, pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kadang sudah tak akur lagi dan terlihat jalan sendiri-sendiri. Apalagi jika didalam pelaksanaan pemerintahan para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara terang-terangan menyatakan niatnya untuk maju kembali bertarung dan menjadi penantang di periode berikutnya.

Konflik yang terjadi antara Iksan Iskandar Bupati Jeneponto dan Mulyadi Mustamu Wakil Bupati Jeneponto memang mendapat perhatian dari berbagai kalangan terkhusus pada masyarakat Kabupaten Jeneponto padahal keduanya memiliki *track record* kepemimpinan yang sangat bagus. Baik saat menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan juga sebelum menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jeneponto.

situasi yang semakin memanas dan terpecah belah akibat konflik yang terjadi antar keduanya juga memicu terjadinya konflik



antar para simpatisan serta pendukung Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto bahkan Konflik yang terjadi antar para simpatisan dan pendukung kedua tokoh ini telah memakan korban. Pasangan yang terkenal dengan tagline “SIAP-BISA” ini mengawali kariernya dari bawah dan melalui perjuangan yang sangat panjang berhasil merebut kekuasaan pada Pilkada Kabupaten Jeneponto tahun 2013. Pasangan ini berhasil terpilih dengan perolehan 102.497 suara<sup>32</sup>.

Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh beberapa hal antara lain, pembagian kewenangan berdasarkan kesepakatan bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perbedaan kepentingan, perebutan kekuasaan, adanya dorongan dari elit dan kelompok kepentingan agar Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berpisah.

Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto juga berdampak pada, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tidak kompak, terjadinya konflik kepentingan antar Aparatur Sipil Negara, program-program Pemerintah Daerah tidak berjalan dengan baik, konflik antara pendukung dan simpatisan SIAP (Bupati) dan BISA (Wakil Bupati).



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota KPUJ Jeneponto (Hasil Rekapitulasi akan pada halaman selanjutnya).

Pemikiran di atas tergambar dalam bentuk skema kerangka pikir di

bawah ini:

